

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, dan standar hidup layak. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional dan situasi global. Akibat dari adanya globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia.

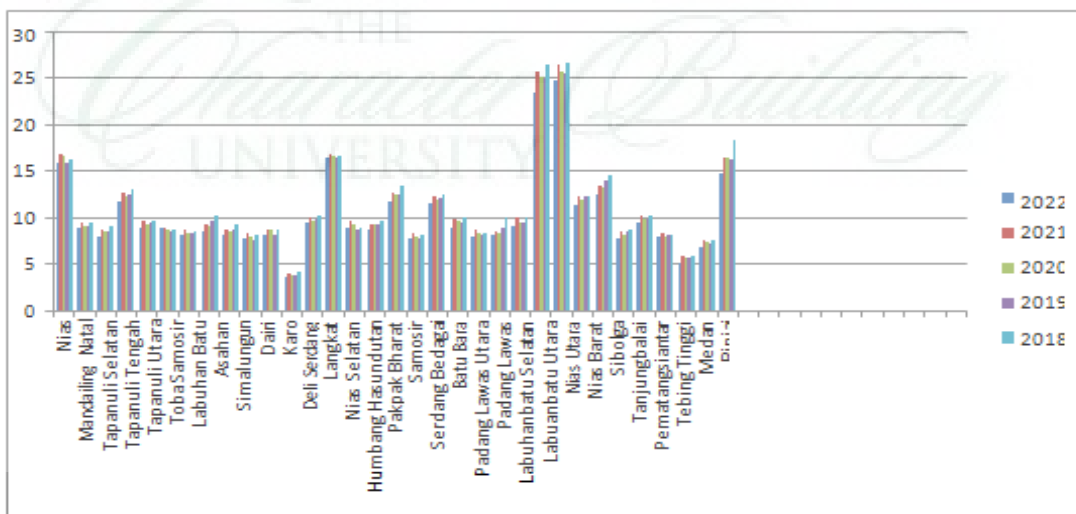
Beberapa negara berkembang termasuk Indonesia kemiskinan masih menjadi fenomena yang harus segera di tangani oleh pemerintah setempat. Kemiskinan ini dapat terjadi karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai pada suatu taraf yang dianggap layak atau pantas. Kemiskinan juga masih menjadi persoalan yang penting untuk dihadapi oleh pemerintah di Indonesia dan sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik. Sebab dari kemiskinan tersebut membuat taraf hidup masyarakat rendah karena masyarakatnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan (Todaro, 2014).

Kurang mampunya seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasar diartikan sebagai kemiskinan yang dilihat melalui berbagai aspek (Giovanni, 2018). Kemiskinan di Indonesia sebagian besarnya terletak pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera (Hanifah dkk, 2021). Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk dalam daerah yang masih berketuk dengan masalah kemiskinan.

Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah Provinsi yang Ibu kotanya dalah Medan. Suamtera Utara merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang memiliki penduduk terbanyak. Tersedianya potensi sumber daya alam (SDA) yang berupa laut tersebut selayaknya Provinsi Suamtera Utara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya baik berupa sandang, papan, dan pangan. Namun, pada kenyataannya kemiskinan juga masih menjadi permasalahan utama yang harus di tanggulangi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 1.1

Persentasi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BPS Sumatera Utara

Grafik 1.1. diatas dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan yang terjadi di Kab/Kota yang Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022, Grafik tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan yang terjadi di kab/kota yang ada di Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi.

Daerah yang memiliki kemiskinan tertinggi di provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2018 – 2022 adalah kabupaten Nias Utara 29,07% ditahun 2018 hal ini disebabkan distribusi barang ke Pulau Nias itu tidak lancar. Jadi bisa nantinya harga-harga komoditas lebih mahal di desa dibandingkan di kota hal ini memberatkan masyarakat. Permasalahan lapangan kerja yang minim di Nias Utara juga menjadi penyebab angka kemiskinan tinggi, minimnya peluang bekerja diakibatkan lapangan kerja yang sedikit, serta sumber daya baik manusia untuk mengelola alam yang ada juga masih kurang, padahal untuk kekayaan alam disana melimpah (Halawa, 2021). Untuk kabupaten termiskin selanjutnya ada kabupaten Nias Barat 23% di tahun 2018, kabupaten Gunung Sitoli 21,66% pada tahun 2018, kabupataen Nias Selatan 18,48 % ditahun 2018 dan kabupaten Nias sebesar 18,11 ditahun 2018, serta kemiskinan terendah terdapat di kabupaten Deli Serdang yang dimana berada dibawah 5%.

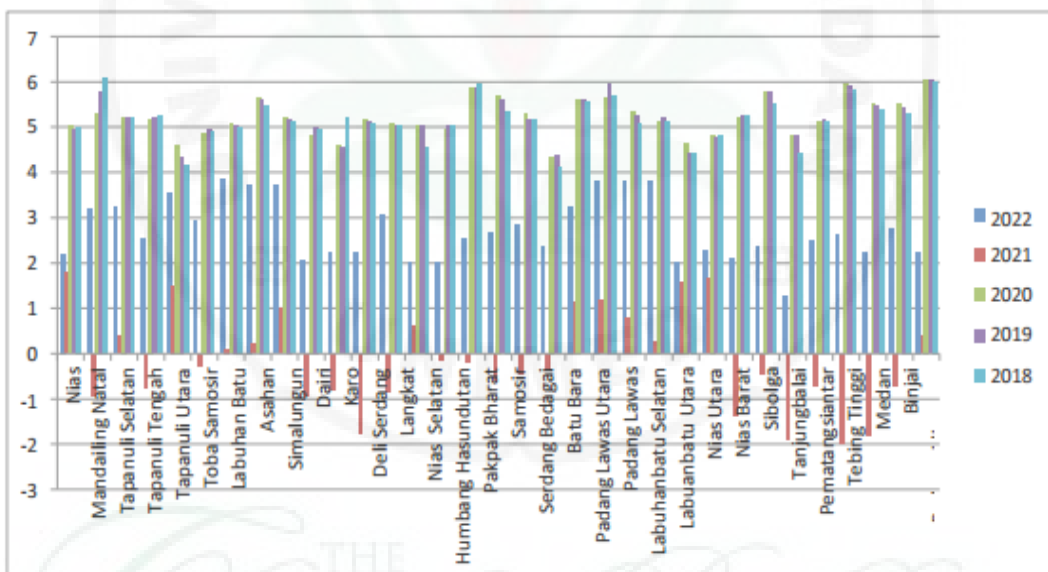
Adanya penurunan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan membawa sebuah keberhasilan. Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk di kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan sering dikatakan sebagai masalah yang rumit dalam

proses Pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses keadaan negara yang mengalami berbagai masalah yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan(istitusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata bisa saja sekaligus diraih, dan dari beberapa Negara yang mampu membuktikannya.

Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang harus berjalan secara bersama-sama. Pilihan yang diambil adalah bukan strategi pembangunan yang memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya didalam suatu Negara tertentu atau bukan juga strategi yang menitikberatkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata, tetapi kedua hal tersebut penting untuk diraih secara bersama-sama (Todaro, 2014:212).Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang. (Amir, 2017 dalam Romi, S. & Umiyati, E., 2017)

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Pertumbuhan Ekonomi atau Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Nilai laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan negara dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

Grafik 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018- 2022



Sumber : BPS Sumatera Utara

Berdasarkan grafik 1.2. diatas menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi atau keadaan naik turun setiap tahunnya dari periode 2018 sampai dengan periode 2022. Sejak tahun 2018-2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tidak pernah mencapai 5%. Tabel diatas mendeskripsikan pertumbuhan Ekonomi di kab/kota Sumatera Utara mengalami fluktuasi.

Untuk Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah Menurut BPS adalah kota Medan pada tahun 2020, terpuruk imbas dari pandemi Covid-19 yaitu sebesar -1,93%. Hal ini menyebabkan terkontraksinya PDRB sektor konstruksi dan PDRB sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan negatif 12,55% menjadi Rp 8,48 triliun dibanding tahun sebelumnya Rp 9,69 triliun.

PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami kontraksi terdalam berikutnya adalah kota Pematang Siantar, yakni sebesar 1,89%. Diikuti kota Binjai yang mengalami pertumbuhan negatif 1,83%, serta Kabupaten Deli Serdang dan kota Sibolga masing-masing 1,78% dan 1,36%. PDRB kabupaten Dairi mengalami pertumbuhan negatif 0,94% pada 2020 dibanding tahun sebelumnya. Diikuti kabupaten Mandailing Natal yang mengalami pertumbuhan negatif 0,94% dan kabupaten Langkat mengalami kontraksi 0,86%. Demikian pula PDRB kabupaten Karo dan kabupaten Tapanuli Tengah yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,8% dan 0,76%.

Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi yang pertumbuhannya belum stabil. Pertumbuhan ekonomi meningkat yang didukung dengan berkembangnya beberapa faktor seperti banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia yang menjadikan berkurangnya angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara, namun dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat kalangan bawah (buruh) agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan menekan angka kemiskinan.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Kemiskinan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya penduduk yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan pada umumnya tidak memadai (Saporta, 2011: 1).

Negara Indonesia sering dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk tersebut keempat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat (sumber: Wikipedia.org).

Menurut BPS, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan, efek dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan.

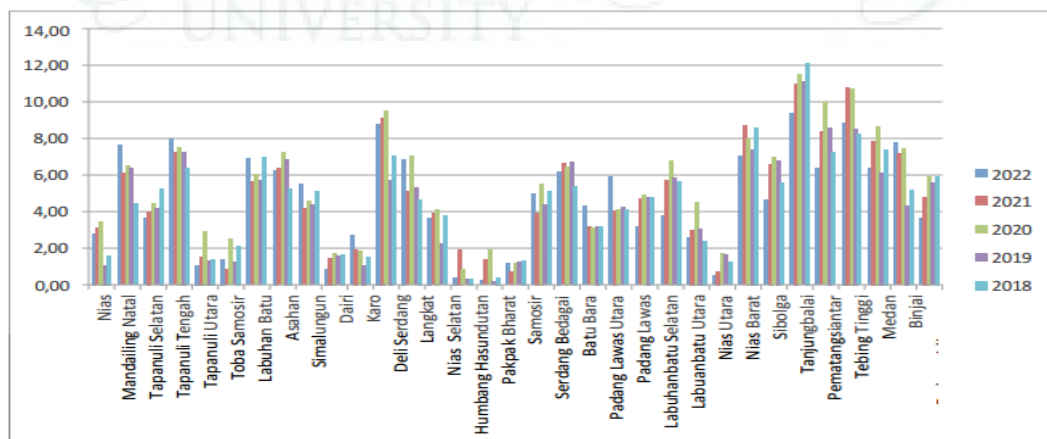
Pengangguran terbuka dapat pula dikarenakan kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga manusia, atau akibat kemunduran perkembangan suatu industri. Pengangguran merupakan kondisi seseorang tergolong angkatan kerja dan yang menginginkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut, Menurut Sukirno (2015). Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan.

Faktor yang paling besar perannya dalam terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Menurut BPS (2018) menjelaskan bahwa pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan pekerjaan baru atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) akan tetapi mau bekerja jika ada peluang, atau tidak mencari pekerjaan /tidak mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara masih dapat dikatakan tinggi, karena masih banyak tenaga kerja yang seharusnya dapat bekerja namun karena beberapa faktor diantaranya yaitu minimnya lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Di Sumatera Utara mulai banyak pabrik yang membuka lowongan pekerjaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan begitu dapat mengurangi angka kemiskinan, jumlah tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel berdasarkan data yang ditemukan sebagai berikut:

Grafik 1.3

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Sumatera

Berdasarkan grafik 1.3 di atas Tingkat Pengangguran Terbuka yang paling rendah terjadi pada tahun 2019 Sedangkan pada tahun 2020 merupakan tahun dengan persentase pengangguran terbuka paling tinggi yaitu sebesar 6,91%, pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 5,6% dan pada tahun 2022 naik menjadi 6,33%.

Kota Siantar menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 12,08 % pada 2018. Ketidakterediaan lapangan pekerjaan yang cukup menjadi salah satu penyebab tingginya TPT. Penduduk usia 15 tahun ke atas di Pematang Siantar yang masuk ke kategori usia produktif, seharusnya bisa menghasilkan pekerjaan. Namun kenyataannya, kelompok usia itu malah memilih untuk tidak bekerja, Pematang Siantar adalah kota yang perekonomiannya digerakkan tiga sektor utama yakni perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi.

Pada saat krisis ketiga sektor ini merupakan sektor ekonomi yang paling besar terparah dampak Pandemi COVID-19 dan mengalami penurunan sangat tajam. Kondisi ini menyebabkan TPT Pematang Siantar meningkat cukup tinggi lalu selanjutnya ada kota Medan 10,8 % pada 2021 dan Deli Serdang 9,52% 2020. Untuk yang terendah ada di kabupaten Humbang Hasundutan, kabupaten Pakpak Bharat, kabupaten Samosir, kabupaten Dairi dan kabupaten Karo yang selalu berada di bawah 2%.

Faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yaitu kompetensi yang dimiliki angkatan kerja tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini tentunya dapat memberi pandangan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara masih belum stabil

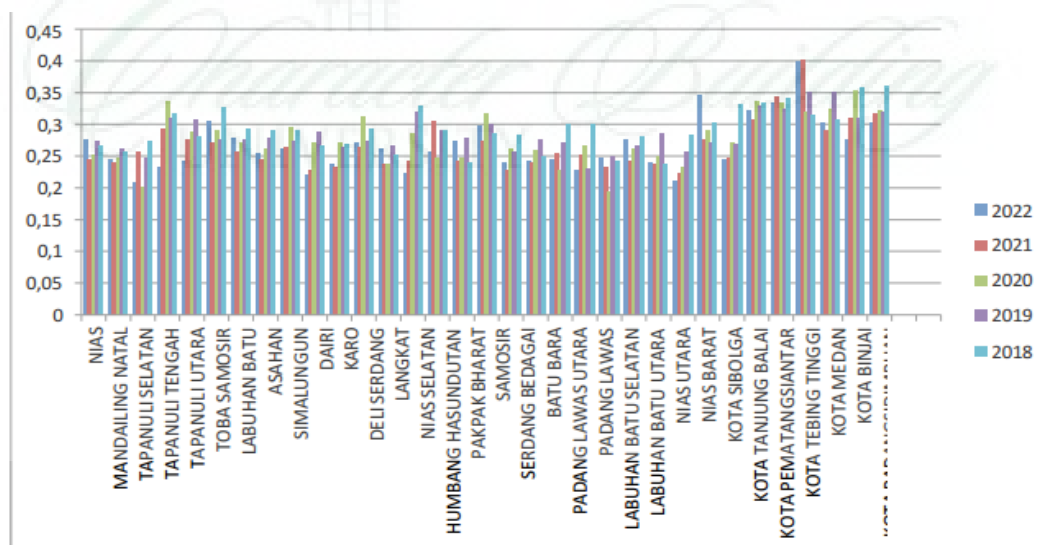
sehingga naik turunnya tergantung dari jumlah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan faktor lainnya.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terbuka salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Menurut Barber (2010) dalam Annim et al. (2012) mengatakan bahwa hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan adalah hubungan yang pragmatis yaitu kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan. Salah satu indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan yaitu menggunakan Indeks Gini.

Indeks gini merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah secara menyeluruh. Semakin mendekati nilai 1 maka ketimpangan di suatu daerah tersebut tinggi dan apabila semakin mendekati nilai 0 maka distribusi pendapatan telah merata dengan baik.

Grafik 1.4

Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Sumatera

Jika dilihat dari grafik 1.4 diatas, ketimpangan pendapatan tertinggi pada tahun 2018 yaitu 0,3176. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara di ikuti juga oleh nilai persentase penduduk miskin yang tinggi, Sehingga perlu diperdalam bagaimana hubungan ketimpangan pendapatan ini terhadap kemiskinan. Untuk ketimpangan pendapatan yang ada di kabupaten/kota Sumatera utara yang tertinggi ada di kota Medan pada tahun 2021 yang menyentuh angka 0,4 % Adanya ketimpangan yang mencolok antar berbagai daerah (inter-regional disparity). Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan kota Medan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan lainnya, Pembangunan yang tidak merata dan terpusat pada beberapa sektor ekonomi di beberapa wilayah dengan sumber daya yang tinggi menyebabkan tingkat ketimpangan distribusi di kota Medan masih tinggi walaupun kota Medan mengalami Pertumbuhan Ekonomi. Lalu untuk kabupaten terendah ada di kabupaten Labuhan Batu Selatan 0,18% pada tahun 2020.

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi, Pengangguran Terbuka, dan Ketimpangan Pendapatan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jika pertumbuhan ekonomi naik maka dapat dilihat masyarakat miskin dapat merasakannya, jika Pengangguran Terbuka turun atau rendah maka dapat mengindikasikan masyarakat miskin yang menganggur dapat berkurang karena mendapat pekerjaan, dan jika tingkat ketimpangan pendapatan turun maka distribusi pendapatan telah merata dengan baik sehingga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.

Maka dari itu untuk membuktikan bahwa persoalan pertumbuhan ekonomi naik, pengangguran Terbuka turun, dan ketimpangan pendapatan turun dapat menanggulangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara atau tidak. Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan
2. Pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi atau keadaan naikturun setiap tahunnya dari periode 2018 sampai 2022.
3. Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan tinggi.
4. Ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara pada periode 2018- 2022 yang tertinggi pada tahun 2018 yang artinya distribusi pendapatan belum merata dengan baik.

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan.
2. Data yang dipakai adalah data tahunan dalam kurun waktu tahun 2018- 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah di paparkan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 ?
2. Apakah ada pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 ?
3. Apakah ada pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 ?
4. Apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.
2. Menganalisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.
3. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.

4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 ?

1.6 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah disampaikan di atas, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

2.1 Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus menjadi informasi yang dapat dijadikan referensi bagi pembaca mengenai kemiskinan yang dijelaskan dalam persentase penduduk miskin dengan melihat dari variabel-variabel independen yang telah dipilih yaitu pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018- 2022.

2.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.